

# ISLAM DAN NEGARA DALAM POLITIK ORDE BARU (1966-1994)

*Islam and State in The New Order Politics (1966-1994)*

Abd. Asis T<sup>1)</sup>, Afan Gaffar<sup>2)</sup>, dan Riswandha Imawan<sup>2)</sup>

*Program Studi Ilmu Politik  
Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada*

### ABSTRACT

The relationship of Islam and the State in a country where majority of the people are Moslem is frequently marked by uneasy feeling. In Indonesia, such phenomena is also encountered. It is this topic which this study focuses on, restricting to the era of New Order (1966-1994). The study has the objective of elucidating the changes which had taken place in the relationship of Islam and the State during the era of New Order (1966-1994) from antagonistic (1967-1981) to reciprocally critical (1982-1985) and finally accomodative (1985-1994).

The relationship of Islam and the State was analyzed based on perspective theory of State and Civil Society. Structural approach was used. The study was descriptive and evaluative. Agregat data and documentary data were collected through literature study. Hence, analytical method was adopted in this study was qualitative.

The results revealed that: First, the relationship of Islam and the State during the era of New Order was influenced by suppressor variable is New Order political model and Islamic general features of the Indonesian.

Secondly, from that very fact, the accomodative relationship of Islam and the State is bidirectional. In one way the State accomodates the needs of Islam. In another way Islam provides supports to the State. Thirdly, the changes in relationship Islam and the State coincides with the change of State perception to becoming positive to Islam, and vice versa. Fourthly, the State perception to Islam was changed since (1) Trauma of Islamic rebellion in the past has faded. (2) There was a better understanding, appreciation, and perception among member of elite society in the State itself towards Islamic society. It is due to involvement of figures known to have strong background of

Islam in the government, a phenomenon known as "Santrisasi Priyayi", and due to better understanding and perception from the elite society in the government towards Islam, particularly from the president himself, a phenomenon known as "Santrisasi Priyayi"; and (3) Potential of Islamic Society as majority of Indonesian people in supporting National Development Program, system legitimacy and powerful vote it promises in any general election. The change of Islamic society towards the government if affected by (1) The Islamic groups is diversity, (2) Modernization of Islamic education, and (3) New frame of reference towards Islamic norms and dogmas, as well as perception towards socio-political reality of the New Order.

**Keywords:** *Islam – State – Civil Society – New Order Politics*

1) *Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau Pekanbaru*

2) *Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*

## PENGANTAR

Hubungan canggung antara Islam dengan Negara, merupakan gejala umum yang dapat ditemui pada negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Topik ini menjadi fokus utama kajian para ilmuwan sosial dari berbagai disiplin. Masalah itu antara lain, apakah ada konsep negara dalam ajaran Islam (Al Qur'an dan Sunnah Rasul) dan bagaimana pemikiran politik Islam menjelaskannya? Kemudian pada aspek empirisnya, apakah mungkin "Negara Islam" itu dapat diwujudkan dalam kenyataan sosial? Serta yang mana dan bagaimanakah "Negara Islam" itu?

Adanya penetrasi konsep "negara bangsa" (*nation state*) yang berasal dari barat menimbulkan perdebatan di antara tokoh-tokoh Islam dan nasionalis (baik yang beragama Islam maupun yang non-Islam). Sedangkan secara empirik, pengalaman menunjukkan adanya hubungan yang canggung antara Islam dan Negara, terutama setelah Perang Dunia II.

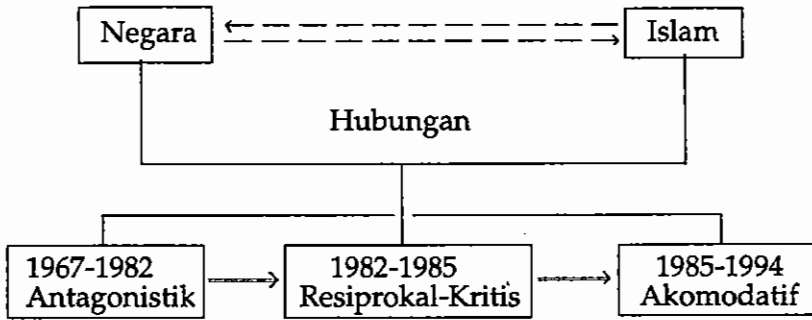
Di Indonesia gejala demikian tampak dalam setiap babakan sejarah, mulai permulaan abad ke-20 ketika nasionalisme Indonesia mulai terbentuk hingga saat ini. Hubungan antara Islam dengan negara selalu berubah-ubah. Apa yang disimpulkan oleh Prof. Deliar Noer dalam salah satu tulisannya tahun 1988 cukup representatif untuk menggambarkannya. Menurutnya, dalam sejarahnya, kedudukan dan peranan politik Islam di Indonesia mengalami proses pasang surut. Dan barangkali lebih banyak surutnya daripada pasangannya. Ia pasang pada tiap permulaan zaman-zaman, kecuali Demokrasi Terpimpin yang dimulai dan diakhiri dalam keadaan surut. Sedangkan pada permulaan zaman-zaman lain (penjajahan Belanda, Demokrasi Parlementer, dan Orde Baru) ia pasang, untuk kemudian surut. Kecuali pada masa Revolusi di mana kedudukan pasang pada dirinya boleh dikatakan konstan.

Pada awal pemerintahan Orde Baru, di kalangan aktivis Islam timbul optimisme untuk kembali memainkan peranan dominan dalam politik nasional, mengingat sumbangan mereka dalam meruntuhkan rezim Orde Lama. Kerjasama di antara ABRI, Organisasi Mahasiswa, dan Kelompok Islam dalam menjatuhkan PKI dan Bung Karno setelah Peristiwa G 30 S/PKI memberi indikasi bahwa Islam mendapatkan legitimasi dalam peran politiknya. Tetapi optimisme itu buyar, ketika muncul pernyataan ABRI tentang partai-partai terlarang PKI dan juga Masyumi yang dianggap pernah menyelewengkan Pancasila dan UUD 1945. Masyumi kemudian dilarang berdiri. Sejak itu, kedudukan dan peranan politik Islam berada dipinggiran.

Apabila hubungan Islam dan negara dalam era Orde Baru dipriodesasi, maka dapat dibagi atas tiga priode. Periode Pertama: 1967-1982. Hubungan antara Islam dengan negara ditandai oleh pola yang sifatnya antagonistik, di mana negara memiliki posisi yang hegemonik, sedangkan Islam berada di pinggir. Dalam hubungan yang bersifat antagonistik, posisi Islam dan negara saling berlawanan, bahkan

cenderung konflik. Priode Kedua: 1982-1985. Dalam priode ini sifat antagonistik masih tetap ada, akan tetapi terdapat upaya di kedua pihak untuk perlahan-lahan mulai mengurangi kecurigaan di antara mereka dengan saling memahami posisi dan potensi masing-masing. Negara mulai memandang penduduk Islam yang mayoritas sebagai faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Sebaliknya, Islam mulai menempatkan negara dalam posisi yang tidak konfrontatif dengan mereka. Priode ini dapat disebut dengan resiprokal-kritis. Dalam kurun waktu ini, terjadi "ketegangan konseptual" yang dapat mengganggu upaya pendekatan kedua belah pihak, yaitu kebijaksanaan pemerintah untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi seluruh orsopol dan ormas. Periode Ketiga: 1985 sampai sekarang. Pola hubungan tersebut berubah menjadi akomodatif, yaitu hubungan yang satu sama lain saling menguntungkan.

Fenomena di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



Fenomena tersebut menarik untuk dikaji, apalagi dihubungkan dengan sejarah perkembangan bangsa Indonesia yang saat ini sedang memulai PJPT II. Tahun 1998 oleh banyak Ilmuwan Politik diduga akan terjadi suksesi Presiden. Bagaimana peranan Islam dalam suksesi tersebut? Apakah peranan politik Islam akan menjadi pasang? Atau tetap surut? Analisis prediktif semacam ini, tentu saja, hanya dapat dijawab setelah mengkaji fenomena yang terjadi sebelumnya.

Kajian tentang Islam dan politik di Indonesia selalu menarik dilakukan. Hal ini disebabkan karena berbicara tentang politik di Indonesia, harus pula berbicara tentang Islam. Islam adalah agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia. Secara sosiologis, potensi Umat Islam sangat besar dan menentukan sebagai sumber legitimasi sistem politik, menyukseskan Pembangunan Nasional, dan setiap kali pemilu diadakan, kesan Islam selalu ditampilkan. Secara doktrinal, ajaran Islam melingkupi kehidupan politik-kenegaraan, bersamaan dengan sistem nilai lainnya. Sehingga sekulerisasi politik terhadap Umat Islam tidak akan pernah berhasil. Beberapa hasil penelitian mengenai topik ini belum begitu banyak, utamanya yang khusus berfokus pada kecenderungan hubungan Islam dengan Negara yang semakin akomodatif medio 1980-an hingga saat ini.

Dalam penelitian ini, permasalahan yang akan dijawab adalah: (1) Bagaimana hubungan Islam dengan Negara pada masa Orde Baru (1966-1994)? (2) Mengapa terjadi perubahan sifat hubungan dari antagonistik (1967-1982), melalui masa resiprokal-kritis (1982-1985), menjadi hubungan yang akomodatif (1985-1994)? (3) Apa hubungan yang akomodatif tersebut mempunyai implikasi terhadap kepolitikan Orde Baru dan peranan politik Umat Islam di Indonesia?

Pertama-tama untuk menjawab permasalahan hubungan Islam dengan Negara akan diuraikan nisbah antara agama dengan politik secara teoritis. Kemudian perspektif *state and civil society*, model-model kepolitikan Orde Baru, dan ciri-ciri umum Islam di Indonesia.

Islam adalah agama dalam pengertian *al-din*, bukan *religion* dalam pengertian barat (Q.S. 3:19, 5:3). Ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia (Q.S. 3:112). Termasuk bidang politik-kenegaraan. Islam tidak mentolerir sekulerisme. Setiap upaya memisahkan agama Islam dengan politik-kenegaraan, niscaya akan gagal. Dalam waktu yang tentatif misalnya, bisa saja berhasil. Akan tetapi untuk jangka waktu yang lama, tidak akan pernah berhasil. Kendatipun ajaran Islam menyangkut politik-kenegaraan, akan tetapi yang diatur hanya menyangkut prinsip-prinsip dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Islam "kosong" dari sistem politik (Sjadzali, 1990). Tidak ada satu pun dalil (*gothi'i* dan *dhanni*) yang memerintahkan untuk mendirikan Negara Islam. Masalah konsep negara Islam termasuk dalam bagian *Itjihad* yang diserahkan sendiri kepada umat untuk merumuskannya (Othman, 1992).

Negara Orde Baru adalah "Negara Organik" dengan strategi korporatisme. Tujuan Negara bisa saja —paling tidak secara formal— untuk kepentingan seluruh masyarakat (Stepan, 1978). Akan tetapi dalam setiap perumusan kebijaksanaan nasional tidak pernah melibatkan masyarakat (King, 1982). Hubungan *state* dan *society* berada dalam proses alienatif. Di mana *state* sangat dominan dan memenuhi kepentingannya sendiri. Sebaliknya, *society* lemah, dan terus-menerus berada dalam *hegemony* dari *state*. Dalam keadaan yang demikian, demokratisasi hanya bisa bergulir apabila ada "penguatan" *society*, dan sebaliknya "pelemahan" *state*. Yang pertama, ditujukan untuk menciptakan *political society* (masyarakat politik), untuk kemudian terbentuk *civil society*. Yang kedua; dilakukan dengan mengurangi kecenderungan intervensionis *state* ke dalam *society*, untuk kemudian hanya berfungsi pada "fungsi-fungsi khasnya". Hubungan antara *state* dengan *society* ditentukan oleh persepsi *state* terhadap *society*, dan persepsi *society* terhadap *state*.

Islam di Indonesia memiliki ciri-ciri umum yang membedakannya dengan Islam di negara-negara lainnya dilihat

dari sudut sejarah kedatangannya, doktrin teologis, struktur sosial, dan ideologi politiknya (Muzhar, 1990). Walaupun kesemuanya tetap bersumber pada Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Namun demikian, dalam interpretasinya seringkali terjadi perbedaan pendapat. Selain itu karena perbedaan dalam pengalaman, pengetahuan dan

pendalaman ajaran-ajaran Islam, maka keislaman dalam masyarakat Indonesia secara sosiologis-politis tidak seragam.

Dalam penelitian ini, hubungan antara Islam dengan Negara merupakan variabel terpengaruh (*dependent variable*), sedangkan persepsi Negara terhadap Islam dan persepsi Islam terhadap Negara merupakan variabel berpengaruh (*independent variable*). Variabel berpengaruh ini dibentuk oleh variabel-variabel pendahulu (*antecedent variable*). Untuk persepsi Negara terhadap Islam variabel pendahulunya adalah: (1) hilangnya mitos pembangkangan umat Islam; (2) "Priyayisasi" santri dan "Santrisasi" priyayi; dan (3) Potensi Umat Islam sebagai penduduk mayoritas dalam memberikan legitimasi sistem politik, menyukkseskan Pembangunan Nasional; dan dukungan suara dalam Pemilu. Sedangkan variabel pendahulu untuk persepsi Islam terhadap Negara adalah : (1) Tumbuh dan berkembangnya golongan menengah Islam yang memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan masa sebelumnya; (2) modernisasi pendidikan Islam yang melahirkan konvergensi pemikiran dan sosial-kultural; dan (3) Pemikiran politik Islam pada masa Orde Baru. Hal ini menyangkut kerangka berpikir mereka terhadap Islam dan realitas politik Orde Baru. Variabel berpengaruh dan variabel terpengaruh ini berada dalam tekanan variabel penekan (*suppressor variable*) Model kepolitikan Orde Baru dan Ciri-ciri Umum Islam di Indonesia.

Berdasarkan atas hubungan antarvariabel di atas, maka hipotesis kerja dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Semakin positif persepsi Negara terhadap Islam dan persepsi Islam terhadap Negara, maka semakin positif pulalah hubungan antara keduanya. Hubungan yang demikian disebut dengan hubungan yang akomodatif.
- (2) Semakin negatif persepsi Negara terhadap Islam dan persepsi Islam terhadap Negara, maka semakin negatif pulalah hubungan antara keduanya. Hubungan yang negatif ini disebut dengan hubungan yang antagonistik.
- (3) Apabila persepsi negara terhadap Islam bersifat positif, sedangkan persepsi Islam terhadap Negara bersifat negatif, maka hubungan yang tercipta antara keduanya bersifat negatif.
- (4) Apabila persepsi negara terhadap Islam bersifat negatif, sedangkan persepsi Islam terhadap negara bersifat positif, maka hubungan yang tercipta antara keduanya bersifat negatif.
- (5) Apabila persepsi negara terhadap Islam ada yang positif dan ada pula yang negatif, sedangkan persepsi Islam terhadap negara juga demikian, maka hubungan yang tercipta bersifat positif (pada beberapa hal) dan sekaligus negatif (pada beberapa hal lainnya). Hubungan demikian disebut dengan resiprokal-kritis.

## CARA PENELITIAN

Dalam ilmu politik ada enam pendekatan, demikian David Apter (1985), yaitu filsafat politik, institusionalisme, Behavioralisme, Pluralisme, strukturalisme, dan developmentalisme. Penelitian ini

menggunakan pendekatan strukturalisme, yang merupakan variasi dari institusionalisme dengan behavioralisme. Selanjutnya, penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis deskriptif-evaluatif. Data yang digunakan adalah data agregat dan data dokumenter disesuaikan dengan data yang ingin dicari. Penelitian ini meliputi tiga cakupan waktu : masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Sehingga teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan secara mendalam. Sesuai dengan jenis data yang ingin diperoleh, maka penelitian menggunakan metode dan analisis kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, peranan politik Umat Islam mengalami dinamika dari satu priode ke priode lainnya. Sebelum masa kolonialisme, Islam yang masuk ke Indonesia mengkristal dalam bentuk Kerajaan-Kerajaan Islam yang banyak di antaranya berjaya sampai ke negara-negara tetangga. Struktur politik yang tercipta bersifat religio-politik di mana peranan Ulama sangat besar dan menentukan. Bahkan kadang-kadang, dalam banyak kasus, Sultan yang berkuasa juga adalah seorang Ulama.

Masuknya kolonialisme yang di pandang "lain" dalam kerangka berpikir Islami, menjadikan Islam tampil sebagai simbol-simbol perlawanan. Kebangkitan nasional pada awal abad ke-20 menambah wacana gerakan nasionalisme Indonesia dengan berkembangnya ideologi-ideologi "lain", seperti nasionalisme sekuler, sosialisme, dan komunisme. Pergulatan yang bersifat ideologis di antara pejuang-pejuang Indonesia terus berlangsung sampai masuknya penjajahan Jepang. Diawali dengan pasangannya peranan tokoh-tokoh Islam, karena penjajah Jepang membutuhkan dukungan massa, yang hanya dapat diraihinya dengan merekrut tokoh-tokoh Islam yang kharismatik. Namun demikian, pada akhir-akhir masa pendudukannya, Jepang mulai meninggalkan tokoh-tokoh Islam, dan menarik tokoh-tokoh nasionalis sekuler. Komposisi keanggotaan dalam BPUPKI dan PPKI, salah satu indikatornya.

Dalam sidang-sidang PPKI ini pulalah terjadi perdebatan ideologis dari tokoh-tokoh Islam yang memperjuangkan ideologi Islam sebagai dasar negara, dengan tokoh-tokoh nasionalis sekuler yang memperjuangkan dasar kebangsaan. Kompromi antara kedua kelompok ini bermuara pada dirumuskannya Piagam Jakarta, 22 Juni 1945. Di lihat dari sudut ini, Piagam Jakarta merupakan "Konsensus Nasional" dari *Founding Fathers* Indonesia. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, rumusan Piagam Jakarta tersebut dengan penuh keikhlasan rela dihapuskan oleh beberapa tokoh Islam atas desakan Mohd. Hatta. Maka, —sekali lagi— di lihat dari fakta sejarah ini, Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana rumusannya saat ini adalah "hadiah" Umat Islam kepada bangsa Indonesia.

Dalam masa revolusi, peranan tokoh-tokoh Islam yang berjuang melalui partai-partai politik besar sekali sumbangannya dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Memulai masa Demokrasi Parlementer, peranan tokoh-tokoh Islam melalui partai-partai politik Islam "pasang" yang ditandai oleh seringnya mereka membentuk kabinet, sampai berlanjut dalam perdebatan dalam Majelis Konstituante. Dalam Majelis tersebut kembali mencuat perdebatan ideologis, antara Islam dengan Pancasila, sebagai dasar negara. Sayang sekali, belum sempat mereka merampungkan tugasnya, keburu dibubarkan oleh Sukarno (atas desakan ABRI) melalui Dekrit 5 Juli 1959.

Demokrasi Terpimpin diawali dan diakhiri dengan surutnya peranan partai-partai politik Islam. Tahun 1960, Masyumi diperintahkan untuk membubarkan diri karena dituduh terlibat dalam PRRI. NU yang selamat karena sikap akomodatifnya, tidak dapat berperan banyak, karena politik Demokrasi Terpimpin hanya menyisakan tiga kekuatan politik utama di atas pentas nasional: Sukarno, ABRI, dan PKI. Tiga kekuatan politik inilah yang saling bersaing di tataran elit kekuasaan.

Meletusnya peristiwa G 30 S/PKI merupakan awal kebangkrutan Orde Lama. Setelah keluar Supersemar tanggal 11 Maret 1966, ABRI memperoleh justifikasi untuk mengeliminir kekuatan PKI, dan melalui "tangan ketiga" berusaha mengeliminir kekuatan Bung Karno dengan para pendukungnya. Dalam konteks demikianlah, ABRI melakukan "koalisi" dengan kalangan Islam dan Mahasiswa/pemuda.

Ini berarti pada awal-awal Orde Baru peranan politik Umat Islam pasang. Mereka optimis bahwa tumbanganya Orde Lama, akan tumbang pula segala kekisruhan sosial-politik dan ekonomi, kekangan penguasa (Bung Karno), komunisme, dan lain-lain sebagainya. Harapan-harapan akan terbitnya fajar baru dalam politik Indonesia diiringi pula dengan upaya untuk merehabilitasi Masyumi, mendirikan partai politik Islam baru, isu Piagam Jakarta, dan dasar negara Islam. Namun demikian, harapan-harapan itu tinggallah harapan. "Bulan madu" yang dulu tercipta, kini berganti sikap curiga. Sejak itu, hubungan Islam dengan Negara menjadi antagonistik. Antara tahun 1982-1985 terjadi "ketegangan konseptual" antara Islam dan Pancasila melalui gagasan asas tunggal bagi semua orsospol dan ormas. Masa ini disebut pula dengan resiprokal-kritis. Setelah "*political test*" ini berakhir dengan hasil "lulus", maka antara negara dengan Umat Islam mulai saling mengkomodasi.

Hubungan antara Islam dengan Negara yang terjadi dalam priode antagonistik melalui beberapa tahap seiring dengan perkembangan "kekuatan" Negara Orde Baru. Setelah Pemilu 1971 diadakan dengan kemenangan mutlak Golkar, maka sistem kepartaian di Indonesia menjadi hegemonik. Dalam sistem kepartaian ini, dihasilkan beberapa kebijakan Negara dinilai bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam.

Setelah priode antagonistik, antara tahun 1982-1985 hubungan Islam dengan negara memasuki priode resiprokal-kritis, yang ditandai oleh "ketegangan konseptual" antara Pancasila dan Islam. Namun demikian, berbeda dengan perdebatan dalam sidang-sidang PPKI dan Majelis Konstituante, di mana Islam menjadi ideologi/dasar negara alternatif terhadap Kebangsaan/Pancasila. Dalam kurun waktu ini,

perdebatan berkisar pada kedudukan atau posisi Pancasila dan Islam dalam orsospol dan ormas Islam. Bagi pemerintah, semua orsospol dan ormas harus mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas, sementara di pihak lain, kalangan Islam menganggap bahwa asas Islam tidak perlu dihilangkan.

Setelah UU No. 8/1985 disyahkan berlakunya, maka semua ormas Islam pun menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Priode ini memiliki beberapa arti : Pertama; Penerimaan asas tunggal Pancasila secara filosofis, tidak mengubah apa-apa "bangunan ideologi" ormas-ormas Islam. Sebab Pancasila yang diterima tersebut terlebih dulu "diislamkan". Sehingga tidak terjadi pertentangan apa-apa. Kedua; Menghilangkan kendala ideologis dalam dakwah Islam, baik di mata birokrat, ABRI, maupun yang lainnya. PPP secara formal tidak dapat lagi mengklaim dirinya sebagai Partai Politik Islam.

Priode berikutnya adalah priode akomodatif, yang ditandai oleh lahirnya beberapa kebijakan yang mengakomodasi kepentingan Islam. Beberapa hal yang dapat dicatat : Pertama; inisiatif tetap dominan berasal dari Negara seperti RUU Pendidikan Nasional, RUU Peradilan Agama, izin untuk menggunakan jilbab di sekolah-sekolah, kasus Monitor, SDSB, Bapindo, Tragedi Nipah, dan berbagai unjuk rasa lainnya. Kedua; dalam berbagai kasus lainnya, inisiatif datang dari Umat Islam, akan tetapi hanya berhasil setelah didukung atau diambil alih oleh Negara, seperti kasus pendirian ICMI dan program-program yang dilakukan sesudahnya, BMI, pengiriman Dai ke daerah transmigran. Ketiga; berdasarkan atas hal ini, sebenarnya Umat Islam (*society*) belum memiliki peranan apa-apa dalam perumusan kebijaksanaan nasional. Keempat; perlu dicatat pula bahwa dalam priode ini tetap muncul kelompok-kelompok sempalan yang bertujuan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia, misalnya Peristiwa GPK Warsidi di Lampung dan Kelompok Pandeglang di Pandeglang (1994). Secara umum, gerakan-gerakan fundamentalis tersebut tidak memperoleh dukungan dan simpati kalangan Islam. Berbeda dengan Peristiwa Tanjung Priok yang melibatkan tokoh-tokoh nasional, maka dua gerakan ekstrim ini tidak begitu dikenal oleh masyarakat luas.

## KESIMPULAN

Berdasarkan atas hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka hipotesis kerja yang diajukan sebelumnya dapat diterima. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa : Pertama; Hubungan Islam dengan Negara dalam masa Orde Baru berada dalam "tekanan" variabel model kepolitikan Orde Baru dan ciri-ciri umum Islam di Indonesia. Dengan demikian, perubahan hubungan dari antagonistik, kemudian ke resiprokal-kritis, lalu akomodatif, tidak akan mengubah model kepolitikan Orde Baru dan ciri-ciri umum Islam di Indonesia.

Kedua; Berdasarkan atas hal tersebut, maka hubungan akomodatif berjalan melalui dua arah. (1) Arah Negara ke Islam (*society*), Negara mengakomodasi kepentingan-kepentingan Islam. (2) Arah kedua, dari Islam ke Negara, Islam memberikan dukungannya terhadap Negara.



Dukungan tersebut berupa legitimasi sistem politik, dukungan suara dalam pemilu, dan menyukseskan Pembangunan Nasional. Berbagai kasus yang dianalisis dalam tesis ini tidak menunjukkan adanya kebangkitan peranan politik Islam (*society*). Inisiatif masih lebih dominan dari Negara, dan walaupun ada yang berasal dari Islam, tetapi hanya akan berhasil apabila didukung atau diambil alih Negara. Sehingga "kebangkitan peranan politik Islam" lebih banyak merupakan "kesan" daripada substansi. Sebab berbagai karya yang mengakomodasi kepentingan Islam adalah karya Negara.

Ketiga; Perubahan hubungan Islam dengan Negara disebabkan karena secara bersamaan terjadi perubahan persepsi menjadi positif dari Negara terhadap Islam, demikian pula sebaliknya, Islam terhadap Negara. Yang pertama; perubahan persepsi tersebut mengakibatkan pada pemberian akomodasi terhadap kepentingan Islam. sedangkan yang kedua, menyebabkan pemberian dukungan. Yang kedua ini terjadi karena Umat Islam lebih banyak bersikap reaktif terhadap kebijakan-kebijakan Negara. Sehingga ketika ketika kebijakan-kebijakan itu mengakomodasi kepentingan Islam, maka reaksi yang ditampakkkan juga bersifat positif.

Keempat; Perubahan persepsi Negara terhadap Islam dipengaruhi oleh (1) menghilangnya trauma masa lalu, yaitu mitos pembangkangan Umat Islam. Setelah semua ormas dan orsospol menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas, maka tidak ada lagi kendala ideologis yang merintang hubungan keduanya; (2) Di kalangan Elit dalam Negara sendiri terjadi peningkatan pengetahuan dan wawasan keagamaannya. Peningkatan ini disebabkan karena masuknya figur-figur yang sudah kuat pemahaman dan wawasan keagamaannya ke dalam Negara (Priyayisasi Santri), dan semakin bertambah kuatnya pemahaman dan wawasan keagamaan kalangan Negara sendiri (Santrisasi Priyayi), terutama Presiden Suharto; dan (3) Potensi Umat Islam Indonesia sebagai penduduk yang mayoritas dalam menyukseskan pembangunan Nasional, sumber legitimasi sistem, dan "primadona" dalam setiap pemilu. Sedangkan perubahan persepsi Islam terhadap Negara dipengaruhi oleh (1) Golongan menengah Islam yang beragam, berasal dari generasi yang lebih muda, yang memiliki visi dan orientasi yang berlainan dengan sebelumnya; (2) Modernisasi pendidikan Islam; dan (3) Kerangka berpikir mereka terhadap norma dan ajaran Islam, serta pandangannya terhadap realitas sosial-politik Orde Baru. Tiga hal di atas menimbulkan konvergensi sosial-kultural di kalangan Islam. Sehingga runtuhlah dikotomi pemikiran tradisional-modernis, Ulama-cendekiawan, santri-priyayi-abangan (*Geertzian*), dan partai politik Islam-bukan partai politik.

Persoalannya sekarang, bagaimana sebaiknya bentuk artikulasi politik Umat Islam? Bercermin pada pengalam Rasulallah, dakwah Islam hanya akan berkembang pesat apabila dilengkapi dengan politik-kekuasaan. Selama tiga belas tahun lamanya dalam priode Mekkah, hanya sedikit saja yang berhasil diislamkan. Berbeda dengan masa Madinah yang dalam kurun waktu sepuluh tahun lamanya, berhasil diislamkan seluruh jazirah Arab. Penyebabnya, terutama karena di

Madinah Rasulullah menjadi Kepala Negara, yang dengan politik-kekuasaannya, berhasil mengembangkan Islam.

Bentuk Negara Pancasila seharusnya dipandang sebagai bentuk final dari perjuangan Umat Islam dalam "pencarian bentuk negara ideal". Perjuangan yang dilandasi oleh obsesi "Negara Islam" harus dieliminir. Sebab secara doktrinal, runtuh dalam dirinya sendiri. Selain itu, realitas politik Orde Baru dengan model-model kepolitikannya menjadi acuan dalam menyusun strategi perjuangan. Mitos mayoritas menjadi tidak relevan, karena sifat Negara Kuat Orde Baru yang *Bureaucratic Polity* tidak memungkinkan peran serta seluruh masyarakat. Sedangkan di sisi lain, ciri-ciri umum Islam di Indonesia menempatkan hubungan Umat Islam dengan "Partai Politik Umat Islam" tidak berbanding lurus.

Idealnya, perjuangan Umat Islam di Indonesia berada dalam kerangka perjuangan demokratisasi. Dalam perspektif *state and civil society* demokratisasi bergulir melalui dua strategi: "Pelemahan" Negara dan "Penguatan" *Civil Society*. Dalam realitasnya, dua strategi ini sangat sulit berjalan karena dominannya Negara Orde Baru, sementara di pihak lain, masyarakat masih sangat lemah. Dalam bahasa Stepan, masyarakat Indonesia masih berada dalam tahap penciptaan *political society* (Masyarakat Politik).

Menurut hemat penulis, realitas politik Orde Baru belum akan berubah sampai suksesi 1998. Sebab salah satu sendi utama dari model kepolitikan Orde Baru adalah peranan dominan dari Presiden Suharto yang "mengayomi" kelompok-kelompok elit di bawahnya yang bersifat pluralitas. Rivalitas elit politik berlangsung dalam "kerangka strategi penyeimbangan" Pak Harto. Karena itu, perjuangan Umat Islam harus berada pula di tingkat Negara dengan melakukan "penetrasi nilai" terhadap kelompok-kelompok elit politik yang ada. Sandarannya kepada: (1) Habibie dengan ICMI-nya; dan (2) Elit-elit politik lainnya, termasuk Perwira-Perwira ABRI yang selama ini dikenal *Commit* terhadap demokrasi dan Islam. Tokoh-tokoh Islam harus mampu melakukan "tawar-menawar" politik yang menguntungkan Umat. Pengalaman pada awal-awal konsolidasi Orde Baru di mana Islam hanya dijadikan sebagai "perpanjangan tangan" untuk kemudian dilupakan harus tidak terulang lagi. Jangan pula terjadi kolusi antara tokoh-tokoh Islam dengan kelompok-kelompok elit, untuk kemudian meninggalkan Umat. Selanjutnya, "pertarungan" menuju suksesi 1998 harus dihindari terciptanya persaingan memperebutkan hegemoni: Islam dengan Negara. Sebab politik Indonesia, politik "zero sum game", politik yang memaksimalkan yang menang, dan meniadakan yang kalah.

Namun demikian, terlalu naif mengharapkan bahwa elit-elit politik dalam Negara akan rela melepaskan "hak-hak istimewanya". Karena itulah, posisi Islam dalam "tawar-menawar politik" harus diiringi pula dengan: (1) proses penyadaran (sosialisasi politik) Umat; dan (2) Peranan Organisasi-organisasi sosial Keislaman melalui "Politik Alokatif". Dalam terminologi *Amar Makruf Nahi Mungkar*, Islam tidak

hanya menekankan kepada Nahi Mungkarnya saja, akan tetapi juga pada Amar Makrufnya. Tidak hanya bersikap reaktif saja, tetapi juga proaktif. Kemampuan Ormas-ormas Islam melakukan tuntutan-tuntutan (input) ke dalam proses politik terus ditingkatkan melalui "alokasi nilai-nilai Islam" terhadap berbagai produk kebijakan Negara.

Dalam hal demikianlah, keberadaan PPP masih sangat dibutuhkan. Sebab, walaupun semua Orsospol sudah bersifat terbuka semenjak Asas Tunggal Pancasila, akan tetapi kesan keislaman dalam diri PPP mustahil dapat dihilangkan. Namun demikian, strategi perjuangan yang dipilih PPP hendaknya tidak dibatasi hanya pada isu-isu yang menggunakan label keislaman. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, PPP sebagai bagian dari *society* harus mampu berjuang dalam kerangka yang lebih luas, kerangka demokratisasi. Keberadaan PPP perlu dipertahankan dan didukung karena —bersama dengan PDI— merupakan Orsospol formal yang secara konstitusional "memiliki peluang" menggeser dominasi Golkar. PPP harus mampu membuat dirinya sebagai "Kekuatan Politik Islam", sebagaimana yang pernah dinikmati oleh SI dan Masyumi di masa lalu.

Berdasarkan uraian di atas, artikulasi politik Umat Islam melalui saluran yang beragam. Dalam level Negara dan level Masyarakat. Menghadapi sukses 1998 nantinya, perlu ada "Koalisi Besar" antara elit-elit politik di tingkat Negara dengan Islam di tingkat Masyarakat. Keberhasilannya, banyak bergantung kepada kepandaian memilih "Siapa" untuk memperoleh "apa".

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Fachry dan Bachtiar Effendi, *Merambah Jalan Baru Islam, Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru* (Bandung : Mizan, 1986).
- Anwar, M. Syafi'i, "Negara dan Cendekiawan Muslim Indonesia Orde Baru", dalam Saiful Muzani (Ed), *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara* (Jakarta : LP3ES, 1993).
- Arato, J dan J. Cohen, *Civil Society and Political Theory* (Cambridge : MIT Press, 1993).
- Boland, B.J., *Pergumulan Islam di Indonesia* (Jakarta : Grafiti, 1985).
- Budiman, Arief, *State and Civil Society in Indonesia* (Clayton : Monash University, 1990).
- Gaffar, Afan, "Politik Akomodasi : Islam dan Negara di Indonesia", dalam *Majalah Prospektif*, Nomor 1 Vol. 4, 1992.
- \_\_\_\_\_, "Islam dan Politik Dalam Era Orde Baru, Mencari Bentuk Artikulasi Yang Tepat", dalam *Ulumul Qur'an* Nomor 2 Vol. IV Tahun 1993.
- Geertz, Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, cet. III (Jakarta : Pustaka Jaya, 1989).
- Heffner, Robert W., "Islam, State and Civil Society : ICMI and the Struggle For

- The Indonesian Middle Class", dalam *Indonesia* No. 56 (October 1993).
- Imawan, Riswanda, "Peranan Organisasi Massa dan Organisasi Politik", dalam *Prisma*, No. 4 - 1992.
- Jackson, Karld D. and Lucian W. Pye, *Political Power and Communication in Indonesia* (Berkeley : University of California Press, 1978).
- Kuntowijoyo, "Agama, Negara dan Formasi Sosial", dalam *Prisma*, No. 8-1984.
- Maarif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Masalah Kenegaraan, Studi Tentang Percaturan Politik dalam Konstituante* (Jakarta : LP3ES, 1985).
- \_\_\_\_\_, *Islam dan Politik Indonesia, Pada Demokrasi Terpimpin (1959-1965)* (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988).
- Madjid, Nurchohis, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan* (Bandung : Mizan, 1993).
- Mulkhan, Abdul Munir, *Runtuhnya Mitos Politik Santri* (Yogyakarta : Tiara Wacana., 1993).
- Muzhar, Atho, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta : INIS, 1993).
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta : LP3ES, 1982).
- \_\_\_\_\_, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965* (Jakarta : Grafiti, 1987).
- \_\_\_\_\_, "Islam dan Politik : Mayoritas atau Minoritas ?", dalam *Prisma*, No. 5 / 1988.
- Othman, Haji Faizal Bin Haji, "Islam dan Permasalahan Sosial Politik", Makalah Dalam Seminar Sehari Tentang Agama dan Perkembangan Kontemporer (Suatu Pembahasan Perbandingan) (Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, 23-26 September 1992).
- Samson, Allan A., "Angkatan Bersenjata dan Ummat Islam di Indonesia", dalam *Assiyasah*, No. 3 Mei 1973.
- \_\_\_\_\_, "Islam in Indonesian Politics", dalam *Asian Survey*, December 1968, Vol. VIII.
- Stepan, Alfred, *The State and Society, Peru In Comparative Perspective* (Princeton, New Jersey : Princeton University Press, 1978).